KAMIS, 29 JANUARI 1981 KOMPAS hal. V

Perbedaan Pandangan Terhadap Minyak Dunia

Dimana Posisi Indonesia?

Oleh: Ibrahim Hasyim

PERBEDAAN pandangan terhadap sesuatu masalah yang dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, adalah hal yang lumrah. Tetapi perbedaan ini akan berakibat serius, jika ia menyangkut sesuatu masalah yang mempunyai implikasi luas dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan satu-satu negara atau banyak negara. Diantara sekian banyak interaksi perbedaan pandangan dalam percaturan dunia sekarang ini adalah, pandangan yang menyangkut komoditi minyak sebagai produk yang bernilai strategis dalam menghasilkan kebutuhan energi dunia.

Perbedaan-perbedaan pandangan terhadap minyak ini secara umum terdiri dari 3 kelompok, yaitu pandangan dari negara-negara OPEC, pandangan dari negara industri maju (OECD) serta pandangan dari negara-negara sedang berkembang. Perbedaan-perbedaan ini tentu saja cukup serius akibatnya, dan dalam kenyataan interaksi yang selalu berbenturan keras adalah pandangan negara OPEC dengan negara OECD. Sedangkan negara-negara berkembang umumnya lebih banyak diam, karena memang mereka menyadari posisinya yang lemah itu.

Indikasi ini dapat dilihat pada reaksi-reaksi yang timbul dari masyarakat dunia terhadap perubahan harga, yang diputuskan baru-baru ini di Bali. Maka seperti biasanya aneka-ragam reaksi hanya datang dari negara-negara OECD. Untuk dapat menyelami di mana sebenarnya letak perbedan pandangan yang mendasar di antara kedua kelompok ini, dapatlah kita bandingkan beberapa soal pokok berikut, yang menjadi pandangan OPEC sepihak dan pandangan OECD di lain pihak.

Secara umum dasar dari pandangan OECD dapat dibaca dari uraian Prof. M.A. Adelman, Presiden "International Association of Energy Economists"', Amerika Serikat, yang dimuat dalam majalah "Petroleum Economist" edisi Oktober 1980.

Soal harga

Seperti diketahui, salah-satu usaha OPEC selama ini adalah menentukan secara bersama harga minyak pada satu tingkat yang dianggap layak.

Usaha ini bermula dari alasan, bahwa harga minyak pada waktu itu sangatlah rendah, dan alasan ini terus berkembang sampai akhirnya seperti alasan yang berlaku pada saat ini, yaitu alasan politik dan ekonomi. Alasan di bidang politik kita catat seperti akibat dari perang Arab-Israel dan sekarang antara Iran dan Irak. Sedangkan di bidang ekonomi kita catat pula seperti meningkatnya inflasi dan berubahnya nilai mata-uang.

Tetapi kesemuanya ini bukanlah alasan yang bisa diterima sepenuhnya oleh OECD. Katanya, kenaikan harga yang bertahap itu tidak lain daripada hasil kecerdikan OPEC dalam bersandiwara dengan skenario yang telah ditetapkannya. Babak pertama dimulai dengan membatasi/mengurangi tingkat produksi, yang dilanjutkan dengan mengusahakan naiknya harga di pasaran bebas. Jika kondisi ini telah dicapai, maka pada babak terakhir ditutup dengan penetapan kenaikan harga kontrak baru. Skenario ini merupakan siklus yang terus berjalan.

Sementara itu jika arah penentuan harga jangka panjang OPEC ditujukan untuk menyadarkan dunia akan semakin langkanya minyak, dengan maksud agar masyarakat dunia menempuh upaya penghematan dan lebih intensif lagi mencari energi alternatif, negara-negara OECD memberi penilaian yang lain.

Tujuan OPEC tidak lain kecuali mengarahkan penentuan harga sampai pada satu tingkat harga, yang sanggup dibayar oleh konsumen atau satu tingkat harga yang mendekati biaya pembuatan minyak sintetis. Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka OPEC akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya. Bagaimana secara tepat menentukan tingkat harga yang optimal, bagaimana mengatur kecepatan mendekati harga maksimum dan bagaimana pula menyamakan perbedaan harga di antara negara-negara OPEC sendiri?

Soal tingkat persediaan

Akibat perang Iran-Irak jelas mengurangi tingkat penawaran minyak dunia. Untuk menutupi kekurangannya, Arab Saudi telah meningkatkan produksinya dari 8,5 juta barrel/hari menjadi 10,3 juta barrel/hari. Dengan usaha ini setidak-tidaknya dapat dicegah kenaikan harga yang tinggi dan memberi pula peranan yang besar bagi Arab Saudi dalam menentukan tingkat harga, karena kontribusinya cukup besar sebagai pensuplai minyak dunia.

Negara-negara OECD melihatnya dari sudut yang lain. Kekurangan penawaran minyak di dunia pada masa yang lalu lebih banyak disebabkan oleh kelemahan negara produsen dalam menghitung jumlah permintaan dunia. Kekeliruan ini telah memberikan implikasi yang luas.

Pengaruh psikologis yang oleh OPEC dianggap tidak perlu, tetapi oleh OECD malahan dianggap rasional. Kenapa tidak? katanya. Dalam situasi minyak yang tidak

Serba sulit

Perbeedaan-perbedaan mendasar antara OPEC dan OECD mengenai minyak ini, cukuplah tajam. Kecuali itu memang ada satu hal yang kelihatannya relatif mendekati persamaan, yaitu akibat dari tingginya harga terhadap perekonomian dunia. Indonesia sendiri mengalami akibatnya berupa kenaikan biaya pengadaan bahan bakar kebutuhan dalamnegeri. Akibat dari kenaikan harga baru-baru ini, tinggal menunggu keputusan saja, apakah Pemerintah atau rakyat yang akan menanggungnya.

Reaksi negara-negara OECD sudah cukup jelas kedengarannya, tetapi kelihatannya negara-negara berkembang lebih banyak berdiam diri. Dengan kondisi ini posisi Indonesia serba sulit. Biasanya selalu di depan memperjuangkan kepentingan dunia ketiga, tetapi di sini kok kabur kelihatannya. Apakah citra positif terhadap Indonesia akan luntur dengan keanggotaan aktif dalam OPEC, yang oleh sbagian negara dinamakan sebagai "kartel", yang berarti mementingkan diri sendiri saja?

Kesemuanya itu saat ini masih bersifat tidak pasti. Artinya di masa mendatang bisa saja ya dan bisa juga tidak. Ini akan tergantung dari bagaimana situasi dunia nantinya. Tetapi kalaupun citra itu sudah timbul, maka lewat hasil konperensi Bali baru-baru ini Indonesia mungkin bisa berbuat banyak, paling tidak mendapat kesempatan untuk membendungnya.

Prof. Dr. Subroto, Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia, telah ditunjuk sebagai Presiden OPEC, yang disamping merupakan kehormatan tersendiri, juga dapat berperan banyak dalam merangkul negara-negara sedang berkembang, di tengah-tengah perbedaan pandangan yang semakin menajam antara OPEC dengan OECD.

Sebagai Presiden OPEC jelas beliau harus bertugas untuk menjamin konsistensi tujuan penentuan harga jangka panjang dalam kaitannya dengan perkembangan pasar yang berubah-ubah. Tetapi dalam kaitan ini perlu diperhatikan saran Presiden Soeharto, yang mengingatkan perlunya dipikirkan akibat dan pengaruhnya kenaikan harga itu.

Selanjutnya yang cukup penting pula adalah menjaga dan mengembangkan hubungan OPEC dengan negara berkembang dalam bentuk kerjasama bantuan atau investasi serta dalam kaitan pembentukan tata ekonomi internasional baru.

Indonesia masih merupakan negara berkembang, tetapi juga belum bisa melepaskan diri dari negara industri maju, sedangkan di pihak lain ia anggota OPEC pula. Peranan Menteri Pertambangan dan Energi RI dalam kedudukan sebagai Presiden OPEC saat ini, memberi kesempatan yang baik untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada, sekaligus memelihara dan menumbuhkan citra serta posisi Indonesia di tempat yang tepat.